



## PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN BLORA

Dhimas Glagah Seta\*, Ratna Herawati, Indarja  
Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [glagahseta@gmail.com](mailto:glagahseta@gmail.com)

### Abstrak

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora merupakan salah satu dinas yang berperan dalam mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Blora. Sebagai dinas yang mengemban tugas dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan banyak menemui hambatan atau permasalahan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas, wewenang, fungsi, dan uraian tugas. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah Kabupaten Blora mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Blora. Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora adalah, Keterbatasan APBD sehingga permasalahan sarana prasarana belum bisa di perbaiki atau diselesaikan, serta Pariwisata Kabupaten Blora bukan menjadi daerah tujuan wisata sehingga tidak ada investor yang masuk untuk mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Blora.

### Abstract

Departement of tourism and culture Blora District is one of the agencies that play a role in managing tourism in Blora District. As the official who took on the task in the field of tourism and culture which is expected to help the District Administration Blora manage tourism, Departement of tourism and culture of many obstacles and problems. The result obtained is that the Departement of tourism and culture duties and powers in accordance with the Regulation Regent Number 49 of 2011 on the translation duties, powers, functions, job descriptions. This can be seen from Blora regency Government efforts to manage tourism in Blora District. Factors which become problems in the implementation of the duties and the authority of departement of tourism and culture Blora District is the limited budget, so that problems of infrastructure can't be repaired and completed, as well as the District Blora not become a tourist destination so there is no investor who went on to develop object-tourism in Blora District

### I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomidaerah di Indonesia yang didasarkan padaundang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan

kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecual idengan pembangunan sektor kepariwisataan.

Pembangunan sector pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sector unggulan(*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek social ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Dari segi kebudayaan, sektor pariwisata Indonesia memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisata asing. Jadi faktor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar didalam pembangunan nasional, untuk itu segala potensi yang ada di tanah air perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu konsep atau rumusan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara Nasional (RIPPNA), regional/propinsi (RIPP-Propinsi), dan lokal kota serta kabupaten (RIPP Kota/Kabupaten).

Salah satu tempat pariwisata di Indonesia terletak di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora adalah sebuah kabupaten yang terletak sekitar 127 km sebelah timur kota Semarang. Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora berbatasan dengan kabupaten Rembang dan kabupaten Pati di Utara. Kabupaten Tuban dan kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) di sebelah Timur, kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di sebelah selatan, serta kabupaten Grobogan di sebelah Barat.

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan. Di bagian Utara kawasan perbukitan merupakan bagian dari rangkaian pegunungan kapur utara. Bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari pegunungan kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Ibukota Blora sendiri terletak di cekungan pegunungan kapur utara. Separuh dari wilayah kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah umumnya merupakan areal persawahan. Sebagian besar wilayah Blora merupakan daerah krisis air pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur.

Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km<sup>2</sup> (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m di atas permukaan laut, Wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 211,13 km<sup>2</sup> sedangkan tiga kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang masing-masing mempunyai luas 183,62 km<sup>2</sup>, 168,17 km<sup>2</sup> dan 128,74 km<sup>2</sup>. Ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi di banding kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 meter dpl. Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km<sup>2</sup>, terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan Negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari

seluruh penggunaan lahan. Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora. Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken dan Jati, masing-masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, dan Kecamatan Japah yang masing-masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional.

Menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah Tahun 1998, Kabupaten Blora merupakan salah satu Unit Kegiatan Wisata (UKW) II yang tergabung dalam salah satu Sub Unit Daerah Tujuan Wisata (DTW) yaitu: DTW B (Demak-Kudus-Jepara). Pada Program Aksi Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2000 diungkapkan visi dan misi yang masih sangat dibutuhkan saat ini, sekaligus juga menonjolkan betapa penting dan strategisnya ikhwal sumber daya manusia di bidang pariwisata. Visi pembangunan pariwisata adalah berupa pembangunan berbasis pada potensi wilayah yang berorientasi pada masyarakat dan lingkungan strategisnya. Misinya adalah berupa pemberdayaan masyarakat (termasuk dunia usahanya) dalam mendayagunakan potensi unggulan wilayah melalui koordinasi dan kerjasama antar sector dan antar wilayah atau daerah.

Kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki potensi

pariwisata, dimana memiliki beberapa obyek pariwisata yang cukup menarik dan memiliki potensi untuk dikembangkan agar menjadi obyek wisata andalan yang dapat menarik tambahan pemasukan pendapatan daerah. Dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek wisata tersebut dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan mengambil penulisan hokum tentang

**“PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN BLORA”**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaantugasdanwewenangpemerintah kabupaten Blora khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola pariwisata?
2. Hambatan apa yang di hadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisatadan budaya di kabupaten Blora?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis

yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

. Pendekatan normatif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian yang menunjukkan fakta-fakta tentang tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Blora.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara teori dan hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Blora. Analisis kualitatif tersebut diperoleh dari hal-hal yang dinyatakan oleh para informan secara lisan yang berupa tanggapan atau jawaban serta pendapat, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu data yang dekriptif yaitu data yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui wawancara.

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora.

##### 1. Tugas Pokok :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blora nomor 49 Tahun 2011 Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan Bupati.
- b. Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kepariwisataan.

##### 2. Wewenang :

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora mempunyai wewenang :

- a. Perumusan Teknis dibidang Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika;
- b. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan

- Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan dibidang Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelayanan Perijinan dan Rekomendasi Perijinan dibidang Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pengendalian dan Pengawasan Perijinan dibidang Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika<sup>2</sup>

#### B. Program Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mendukung tugas pokok dan wewenang dalam pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan kualitas obyek wisata dan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Blora. Maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun dan menetapkan program kerja dari sasaran strategis yang telah di tetapkan. Adapun program umum yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata

---

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Blora

dan Kebudayaan Kabupaten Blora yang di uraikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Destinasi Wisata :
  - a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
  - b. Pengembangan obyek wisata unggulan
  - c. Pengembangan daerah wisata
  - d. Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan
  - e. Pelaksanaan kordinasi pengembangan obyek wisata
  - f. Pengembangan jenis wisata unggulan
  - g. Pemantauan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran wisata
2. Program Pengembangan Pemasaran Wisata
  - a. Membangun kemitraan pengelolaan Pariwisata antar daerah
  - b. Koordinasi dengan sektor pendukung
  - c. Pelaksanaan promosi wisata di dalam negeri
  - d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran wisata
  - e. Pengembangan statistik wisata
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya :
  - a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
  - b. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah

- c. Fasilitas perkembangan kebudayaan daerah
- d. Penyusunan sistem database bidang kebudayaan
- e. Penyelenggaraan dialog kebudayaan
- f. Sosialisasi pengelolaan budaya lokal

### **C. Upaya-Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora Dalam Pengembangan Obyek Wisata Kabupaten Blora**

**a. Potensi Wisata Desa Tempuran**  
Desa Tempuran memiliki objek wisata yang dapat menarik perhatian masyarakat lokal dan yang berada di luar Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Tempuran memiliki daya tarik tersendiri di bidang kepariwisataan bagi masyarakat luas. Potensi wisata tersebut antara lain Waduk Tempuran, Kampung Bluron, Pemandian Sayuran, Makam mantan Bupati Blora dan wisata budaya Kethoprak.

#### **1. Waduk Tempuran**

Objek Wisata Waduk Tempuran merupakan objek wisata yang keberadaannya, melingkari perbukitan di Dusun Juwet, Desa Tempuran, Kecamatan Blora sehingga nampak seolah-olah keberadaan Dusun Juwet berada terapung di atas waduk. Untuk sampai ke lokasi Objek wisata Waduk Tempuran ± 10 km arah timur dari Kota Blora. Luas areal Objek wisata Waduk Tempuran ± 4.675 Ha. Kawasan Objek Wisata Waduk Tempuran mempunyai multi guna yang fungsinya disamping sebagai irigasi tanah pertanian dan



lahan perikanan, juga sangat cocok sebagai pembinaan olah raga Dayung dan pengembangan Kepariwisataa, karena lokasinya yang begitu indah dan menarik. Sebagai pendukung Kepariwisataan antara lain :

- a. Adanya tempat pembibitan ikan tawar dengan system karamba.
- b. Tempat berlatih atlit-atlit Dayung Kabupaten Blora, yang sudah mampu berbicara baik ditingkat nasional maupun internasional.

## **2. Kampung Bluron**

Objek wisata Kampun Bluron merupakan salah satu pilihan terbaru untuk berlibur yang menjadi favorit masyarakat Blora dan sekitarnya. Kawasan ini terletak 8 kilometer dari pusat kota atau tepatnya di kawasan Waduk Tempuran Desa Tempuran Blora Jawa Tengah. Wahana ini selalu ramai dikunjungi oleh sejumlah keluarga yang ingin berlibur pada setiap akhir pekan dengan tempat yang mampu menampung sekitar 200 hingga 250 orang. Wahana permainan yang ada yakni kolam renang yang dilengkapi dengan ember tumpah atau kali deres dalam bahasa Jawa. Tempat bermain air ini sangat digemari anak-anak maupun orang dewasa, dan sangat cocok untuk wahana berlibur keluarga dengan harga terjangkau dan tidak terlalu jauh dari Kota Blora. Pengunjung wahana ini bisa menikmati resto dan pondok lesehan dengan berbagai menu yang cukup menarik untuk dicoba dan sebagian besar merupakan masakan khas Blora dan Jawa pada umumnya. Selain itu kawasan ini juga menyediakan sanggar batik yang

menawarkan batik-batik tulis pilihan khas Blora, dan pada kesempatan tertentu pengunjung bisa melihat langsung cara membatik maupun belajar membatik di sanggar tersebut. Jalanan menuju kawasan wisata air Kampung Bluron cukup baik dengan jalan beraspal dan mampu dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat dengan tempat parkir yang cukup luas.

## **3. Pemandian Sayuran**

Objek wisata Sayuran terletak di daerah perbukitan atau tepatnya berada di Desa Soko, Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, ± 14 km ke arah timur Kota Blora. Sejak tahun 1990 Pemerintah Kabupaten Blora mulai menata kawasan Objek wisata Sayuran secara bertahap, diantara : Kolam Renang, Bak Penampungan Air, Penghijauan dan lain sebagainya. Secara fisik luas kawasan objek wisata Sayuran 6,6 Ha, dengan ketinggian tanah ± 250 m di atas permukaan laut mempunyai hawa yang sejuk serta tiupan angin yang relatif kencang seperti layaknya daerah pegunungan, mempunyai pemandangan yang sangat menarik. Apabila kita berada di atas perbukitan ± 2 km, kita akan dapat melihat dengan mata telanjang keindahan Pantai Utara, Objek Wisata Waduk Tempuran dan Kota Blora.

## **4. Makam Bupati Tempo Dulu**

Makam bupati tempo dulu merupakan Wisata Ziarah terletak di desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora ± 7 Km kearah Utara Blora, mudah dijangkau baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda

empat. Di lokasi makam terdapat beberapa Makam Bupati diantaranya 8 makam Bupati tempo dulu yang pernah menjabat / memerintah Pemerintahan Blora dari tahun 1762 s/d 1925 antara lain : (1). R.T, Djayeng Tirtonoto, Bupati Blora Timur yang memerintah Th. 1762- Th. 1782. (2) R.T. Prawiroyudo, Bupati Blora yang memerintah Th. 1821 – Th. 1823. (3) R.T. Tirtonegoro III yang memerintah Th. 1823- Th. 1842. (4) Joyonegoro Putra Bupati Bojonegoro. (5) R.M.T.A Cokronegoro I yang memerintah Th. 1842. (6). R.M.T.A Cokronegoro II yang memerintah Th. 1857 – Th. 1885. (7) R.M.T.A. Cokronegoro III yang memerintah Th. 1886-Th. 1908. (8). R.A.A Said Abdul Kodir Djaelani yang memerintah Th. 1908 – Th. 1925. Karena jasa-jasanya sampai sekarang banyak peziarah yang berkunjung kesini. Disamping itu, setiap tahun juga diadakan upacara ziarah yang dikaitkan dengan kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora pada tanggal 11 Desember.

### **5. Kesenian Kethoprak**

Kethoprak merupakan bentuk seni tradisional berusia cukup tua, embrionya muncul sejak tahun 1887. Bentuk kethoprak berawal dari permainan orang-orang desa di Klaten yang menabuh lesung secara berirama pada masa bulan purnama. Kebiasaan rakyat desa Klaten ini dikembangkan oleh Wrekasdiningrat di Yogyakarta dengan ditambah antawacana (dialog) serta alat music seperti : kendhang, suling, terbang dan kecrek.

Cerita yang di tunjukkan

semakin beragam, seperti : Abdul Semarasupi, Damarwulan, Jaka Bodho, Aji Saka, Panji Asmarabangun, Rara Mendhut dan Siti Jaleka. Akibatnya dalam hal kostum terdapat keragaman, yakni kejawen, mesiran, basahan, dan gedhong. Kethoprak dipertunjukkan pada malam hari, dengan durasi 4-6 jam. Kethoprak adalah salah satu bentuk teater tradisional yang berpijak pada cerita sejarah dan bertutur dengan bahasa Jawa.

**b. Upaya Pengembangan Desa Wisata di Kawasan Tempuran**  
Syarat-syarat sebagai Desa Wisata tampak pada Kawasan Tempuran, Desa Wisata memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

#### **1. Aksesibilitas yang baik dan mudah**

Tempuran dapat diakses dengan mudah karena tempatnya tidak jauh dari pusat kota, dapat di jangkau dengan kendaraan apapun dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit. Namun demikian jalan menuju ke tempat lokasi perlu diadakannya perbaikan jalan oleh instansi terkait.

#### **2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.**

Kawasan Tempuran memiliki obyek alam seperti waduk tempuran, Pemandian sayuran dan di sayuran tersebut kita dapat melihat pemandangan kabupaten Blora yang indah. Kesenian kethoprak dan Barongan juga terdapat di sekitar



kawasan Tempuran tersebut, beberapa makanan lokal khas Blora juga banyak di sajikan di Café Tempuran dan Lesehan di Kampung Bluron. Makam Bupati yang terdapat di kawasan Tempuran tersebut dapat di gunakan sebagi wisata ziarah dan sejarah.

### **3. Dukungan Masyarakat dan Aparat Desa Tempuran**

Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. Berdasarkan wawancara dengan penduduk dan aparat Desa setempat, mereka sangat mendukung dengan dijadikannya kawasan Tempuran sebagai Desa Wisata.

### **4. Penambahan Fasilitas Homestay**

Homestay merupakan hal penting bagi wisatawan dengan ketersediaan homestay memungkinkan wisatawan bisa tinggal lebih lama. Keamanan di desa tersebut terjamin dan sudah disediakan tempat parkir yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Pada prinsipnya, objek wisata Kawasan Tempuran ini sangat menjanjikan apabila dikembangkan menjadi Desa Wisata andalan Kabupaten Blora. Selain tempatnya yang relatif dekat dengan pusat kota, mudah dijangkau, serta sangat menjanjikan, kawasan tempuran pun menjadi tujuan utama bagi penduduk Blora untuk bersantai, berwisata, melepas penat. Guna menunjang segala sesuatu kebutuhan kepariwisataan, maka potensi wisata yang berada di kawasan Tempuran

perlu dilakukan pembenahan atau pengembangan yang berkaitan dengan kebutuhan aspek kepariwisataan, seperti menyangkut keindahan, kenyamanan, ketenangan, keamanan, kemudahan.

Secara jangka pendek, penataan dan pengembangan tersebut mungkin bisa dilakukan dengan perbaikan sarana fisik terlebih dahulu seperti perbaikan jalan menuju ke objek wisata, kelengkapan papan petunjuk mulai dibuat, perlu adanya papan aturan, larangan, tata tertib bagi pengunjung, perlu adanya prasarana toilet, air bersih, musholla, serta pendirian pos-pos/ loket retribusi pengunjung, serta hal yang sangat penting adalah tersedianya tempat parkir kendaraan roda dua maupun empat bagi wisatawan.

Secara jangka panjang, dimungkinkan Kawasan Tempuran dapat dikembangkan dengan menyuguhkan berbagai seni pertunjukan khas Blora yang mungkin bisa ditampilkan di saat-saat tertentu guna menarik pengunjung. Tentu saja paket wisata budaya perlu dikemas sesuai dengan selera wisatawan sehingga menarik untuk ditonton. Mungkin hal ini bisa di koordinasikan dengan dinas-dinas terkait ( Dinas Pariwisata ) atau dengan sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Blora.

Pada akhirnya, hal yang tidak kalah penting apabila objek wisata ini telah ramai dikunjungi wisatawan, mungkin perlu adanya pondok peristirahatan atau sering di sebut dengan home stay dan kios-kios kecil guna menjual benda-benda

cinderamata khas Blora yang bisa diujakan kepada wisatawan. Hal ini tentu saja bisa berkoordinasi dengan perajin dan masyarakat setempat. Selain memberdayakan warga setempat, dengan adanya Desa Wisata di kawasan Tempuran ini secara tidak langsung bisa dijadikan sebagai ajang untuk mencari tambahan penghasilan.

### **c. Pengembangan Kawasan Tempuran Sebagai Penunjang Pariwisata Kabupaten Blora**

Kabupaten Blora kaya akan pariwisata dan kesenian lokal. Tidak hanya pariwisata alam, tetapi Kabupaten Blora memiliki wisata religi dan wisata geologi yang perlu di kembangkan. Tempuran merukan salah satu kawasan yang terdapat beberapa wisata alam dan religi, di sana juga terdapat pusat kesenian yang di sebut dengan kethoprak, Tempuran juga menyediakan berbagai kuliner khas. Tempuran sudah mencukupi syarat apabila kawasan Tempuran dijadikan sebagai Desa Wisata, karena selain fasilitas – fasilitas wisata, Tempuran juga bertempat tidak jauh dari kota, sehingga mudah untuk dijangkau.

Dengan di jadikannya kawasan Tempuran sebagai Desa Wisata, hal ini akan menunjang pariwisata di Kabupaten Blora. Apabila wisatawan sudah tertarik dengan Desa Wisata Tempuran, mereka akan mencoba untuk mendatangi objek-objek wisata lainnya yang di miliki oleh Kabupaten Blora. Banyak potensi – potensi Blora yang dapat di

kembangkan, mulai dari wisata alam, wisata geologi, wisata religi serta kesenian dan kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Blora. Sangat di sayangkan apabila potensi- potensi yang di miliki ini tidak dapat di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Blora.

Pengembangan kawasan Wisata Tempuran apabila sudah dapat di kembangkan dengan baik dan maksimal oleh instansi terkait dan masyarakat, maka hal ini akan menjadi contoh bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata lain di Kabupaten Blora.<sup>3</sup>

### **D. Hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola pariwisata**

salah satu sumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Sugiyatno menjelaskan bahwa ada 3 permasalahan yang dihadapi dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Blora, yaitu:

- a. Keterbatasan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 telah mendekati tahap akhir. Hal ini ditandai dengan telah ditandatanganinya Nota

---

<sup>3</sup><http://www.harianblora.com/2015/04/oleh-annisa-maulidya-penulis-merupakan.html>tgl 27 September 2016 pukul 11.10

Kesepakatan antara Pemkab. Blora dengan DPRD Kab. Blora tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016, serta tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016. latar belakang dilakukannya Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016, pertama karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD. Kedua, adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ketiga, adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan dalam tahun berjalan, sehingga harus dilakukan perubahan APBD. Adapun rencana Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.912.936.112.000,00 berubah menjadi Rp. 1.941.672.580.462,00, dengan rincian sebagai berikut, Pendapatan Asli Daerah yang semula Rp. 208.168.641.000,00 menjadi Rp. 175.200.000.000,00 atau turun 16 persen. Dana Perimbangan semula Rp. 1.180.502.281.000,00 menjadi Rp. 1.354.773.638.000,00, naik 15 persen, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula Rp. 524.265.190.000,00 berkurang menjadi Rp. 411.698.942.462,00, atau turun

21 persen, penurunannya berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Penyusunan belanja daerah untuk membiayai program dan kegiatan dalam rencana Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016, memepertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 yang hampir berakhir, maka dihindari adanya penganggaran kegiatan fisik konstruksi yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Rencana perubahan belanja meliputi penambahan dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Belanja Daerah sebelum perubahan sebesar Rp.1.958.884.711.000,00 mengalami kenaikan sebesar 6 persen menjadi Rp. 2.078.857.069.302,00.

Pembiayaan Daerah, dalam Rancangan Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 rencana anggaran penerimaan pembiayaan secara total sebelum perubahan sebesar Rp. 52.598.599.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 139.417.488.840,00, naik 165 persen. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp. 6.650.000.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.233.000.000,00, turun 66 persen. Dari perhitungan tersebut, jelasnya bahwa struktur anggaran dalam Rancangan

Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 mengalami defisit sebesar Rp. 137.184.488.840,00 . Defisit ini dapat ditutup semuanya dari pembiayaan netto dengan jumlah yang sama, sehingga secara riil pada Rancangan Perubahan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA), sebesar nihil.<sup>4</sup>

- b.** Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia. Selain itu ada beberapa obyek wisata yang

pengelola / penanggung jawabnya adalah pihak di luar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, contohnya Goa Terawang, Goa kidang dan Goa Sentono ada dilahan milik Perhutani sehingga menjadi tanggung jawab penuh oleh Perhutani. Sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak bisa sepenuhnya mengelola obyek wisata yang menjadi tanggung jawab Perhutani. Sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Blora hanya bertanggung jawab dengan 3 obyek wisata saja yaitu: 1. Water splash Taman M sarbini, 2. Taman Rekreasi Tirtonadi, dan 3. Taman Rekreasi Sayuran.

- c.** Menurut sumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Blora bukan menjadi tempat tujuan wisata, dalam 2 tahun terakhir saja total wisatawan yang datang ke Blora tidak lebih dari 150.000 orang. Data yang diterima tahun 2015 wisatawan yang datang ke Blora adalah 141.250, dan ditahun 2016 wisatawan yang datang adalah 139.021. adanya penurunan menjadi tanda bahwa memang Kabupaten Blora bukan menjadi tempat tujuan wisata, padahal Dinas Pariwisata mematok target wisatawan di 2 tahun terakhir adalah 500.000 orang. Hal ini juga menjadi alasan kenapa hanya sedikit atau bahkan tidak ada investor yang ingin mengembangkan pariwisata di Kabupaten Blora.

<sup>4</sup>[www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item4?id=876](http://www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item4?id=876) tgl 25 januari 2017

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam membangun pariwisata di Kabupaten Blora sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian DPPKKI Kabupaten Blora dengan cara menyusun program yang akan dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Blora. Dengan cara memberikan informasi dan Promosi melalui media jurnal panduan wisata Kabupaten Blora yang isinya berupa tempat – tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blora. Masih banyak tugas dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi, dan Informatika untuk menarik para wisatawan agar berkunjung ke Kabupaten Blora yang dimana Kabupaten Blora juga memiliki Obyek wisata yang tidak kalah menarik dari pada daerah lain.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum bisa bekerja secara maksimal karena adanya hambatan yang mereka hadapi dalam mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Blora, contohnya dengan keterbatasan anggaran yang di berikan pemerintah

kota terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga mereka tidak bisa mengembangkan pariwisata dengan optimal, selain itu masih ada permasalahan seperti sarana prasarana yang belum bisa menunjang tempat pariwisata, hal ini bisa membuat wisatawan merasa tidak nyaman dengan kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang tidak memadai. Blora juga bukan merupakan bukan tujuan wisata serta banyaknya letak obyek wisata ada di pihak perhutani sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak bisa mengelola atau bertanggung jawab penuh atas obyek wisata tersebut.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### 1. BUKU

- Amarah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah (Bandung: Alumni, 1986)
- Curzon dikutip dari Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1983
- Gamal Suwanto, Dasar-dasar Pariwisata (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 1997), hal 1
- I Gede Pitana, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Yogyakarta: Andi, 2009)
- Inu Kencana Syafie, Etika Pemerintahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers, 1988)
- Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat



Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)  
Mudrajat Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2004)  
Nyoman Suwandi Pandit, Ilmu Pariwisata : sebuah pengantar perdana (Jakarta : PT Percetakan Penebar Swadaya,2003), hal 1  
Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).  
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.  
Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).  
Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).  
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1984).  
Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

## 2. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah  
Undang – undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata  
Peraturan Bupati No. 13 tahun 2011 tentang organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora  
Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian DPPKKI Kabupaten Blora

## 3. SUMBER LAIN

<https://fjrbudiman.wordpress.com/2013/01/07/poin-penting-masalah-industri-pariwisata-indonesia/>

<https://limamarga.blogspot.co.id/2012/04/jenis-jenis-pariwisata.html>  
[www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item4?id=876](http://www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item4?id=876)

Jurnal Pariwisata Kabupaten Blora 2016

Jurnal Buku Putih Sanitasi Blora 2014

<http://www.harianblora.com/2015/04/oleh-annisa-maulidya-penulis-merupakan.html>